

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK

Ardhana Januar Mahardhani
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email : ardhana@umpo.ac.id

Naskah diterima: 22/05/2020 revisi: 05/06/2020 disetujui: 18/09/2020

Abstrak

Kebijakan publik merupakan segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan dari banyak pihak, oleh karenanya dalam kebijakan publik juga tidak terlepas dari adanya ilmu politik. Tulisan ini akan menunjukkan persepsi dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan adanya mata kuliah kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat bantu pengumpulan data adalah kuesioner. Hasil yang telah didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi mahasiswa dalam keberadaan mata kuliah kebijakan publik sangat baik. Banyak faktor yang menjadikan mahasiswa antusias terhadap keberadaan mata kuliah kebijakan publik, diantaranya adalah tuntutan pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika lulus, selain menjadi seorang pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP/SMA/ sederajat mereka juga akan bekerja pada lembaga lain seperti pada lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pada bagian-bagian yang strategis seperti perencana program dan analis kebijakan.

Kata kunci: Persepsi, Mahasiswa, Mata Kuliah Kebijakan Publik

STUDENT PERCEPTION IN THE EXISTENCE OF PUBLIC POLICY COURSES

Abstract

Public policy is all forms of regulations issued by the government for the benefit of the community. Public policy cannot be separated from the various interests of many parties, therefore in public policy is also inseparable from the existence of political science. This paper will show the perceptions of students of the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) Muhammadiyah University of Ponorogo with a public policy course. The method used in this research is quantitative with a data collection tool is a questionnaire. The results obtained in this study indicate that the level of student perception in the existence of public policy courses is very good. Many factors make students enthusiastic about the existence of public policy courses, including the demands of work to be carried out by students when they graduate, in addition to being a civic education educator in junior high / high school / equivalent they will also work in other institutions such as government institutions and non-government and strategic areas such as program planners and policy analysts.

Keywords: Perception, Student, Public Policy Course

PENDAHULUAN

Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya (Agustino, 2008: 6). Tetapi definisi yang telah disampaikan oleh Eyestone masih terlalu luas sehingga masih banyak ditemukan makna yang bias untuk memahaminya. Dye juga mendefinisikan kebijakan publik yaitu *public policy is whatever the government choose to do or not to do*. Menurut Dye kebijakan publik adalah sebuah pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sama sekali. Pada hakikatnya kebijakan publik adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan mengatur orang per orang atau golongan, dalam hal ini kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh institusi negara dalam mencapai visi dan misi negara (Rusdiana, 2015: 36).

Kebijakan publik akan memberikan arahan kepada masyarakat menuju perubahan, dari masyarakat awal yang belum memahami tentang arti dan fungsi kebijakan publik sampai dengan tahap masyarakat menuju tahap yang dicita-citakan yaitu masyarakat tertib aturan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mahardhani, 2018: 3). Kebijakan publik pada pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dengan materi ilmu politik, karena keduanya saling bertalian baik secara teoritis maupun praktis. Saat ini dalam dunia pendidikan sudah menjadi keharusan semua pembelajar untuk mendapatkan materi politik serta demokrasi (Sunarto, 2019: 149), tentunya keberadaan materi tersebut sangat bersanding erat dengan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Setidaknya ada tiga pertimbangan tentang pentingnya mempelajari kebijakan publik (Dye, 1995; Anderson, 1984; Price, 1965; Agustino, 2008). Pertama, pertimbangan ilmiah (*scientific means*) adalah bahwa kebijakan publik dipelajari

dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dimana pada gilirannya hal ini dapat akan meningkatkan pemahaman mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Kedua, pertimbangan profesional (*professional reasons*) yaitu kebijakan publik akan diterapkan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam bahasa sederhana studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari. Ketiga, pertimbangan alasan politis (*political reasons*) adalah kebijakan publik dipelajari agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna untuk mencapai tujuan yang sesuai target. Pertimbangan ini akan membawa pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah telah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar.

Adanya pertimbangan profesional (*professional reasons*) maka hal tersebut digunakan sebagai dasar utama diperlukannya belajar kebijakan publik. Dalam pelaksanaannya kebijakan publik akan diterapkan sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial. Masalah sosial menurut Mullaly (Gilligan, 2007) adalah *all social work activity is concerned with social problems. However, although poverty, mental illness, and deprivation may constitute objective phenomena, the analyses, interpretations, and explanations of these phenomena are subjective*.

Dengan banyaknya masalah sosial di masyarakat maka diperlukan adanya sebuah wadah yang mempelajari tentang keilmuan kebijakan publik, salah satunya pada institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah kebijakan publik sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk mengatasi masalah sosial yang multi dimensi, dalam mata kuliah kebijakan publik banyak pembahasan yang sangat empiris sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.

Mempelajari kebijakan publik adalah sebuah ilmu yang sangat multidimensi, tentunya dalam proses pembelajaran yang dimaksud akan memerlukan sebuah tempat yang sesuai untuk mewedahi pembahasan tentang kebijakan publik, baik dalam bentuk diskusi, *role play* model, atau pembahasan studi literatur yang ada. Merujuk dari alasan pentingnya kebijakan publik, setidaknya ketiga alasan yang telah disampaikan sebelumnya akan membawa alur pemikiran tentang pentingnya kebijakan publik dalam segala aspek kehidupan.

Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan sebuah kelompok yang nantinya akan kembali ke lingkungan masyarakat, baik berafiliasi pada institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, atau pada komunitas tertentu, yang kesemuanya selalu berhadapan dengan kebijakan publik oleh karenanya sangat penting untuk mempelajari kebijakan publik ini. Pemilihan Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada reputasi program studi PPKn yang telah terakreditasi A (Unggul) selain itu dari data tracer study yang telah dibagikan oleh Prodi PPKn pada tiap tahunnya menunjukkan mahasiswa memiliki profesi yang beragam diantaranya adalah pada instansi pemerintahan, lembaga non pemerintahan, serta pada lembaga swasta.

Penelitian tentang persepsi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana persepsi mahasiswa dengan keberadaan mata kuliah Kebijakan Publik, selain itu juga mengetahui faktor apa yang menjadikan mahasiswa mahasiswa perlu mempelajari kebijakan publik. Definisi persepsi dalam penelitian ini adalah menurut Sarwono (Listyana, 2005: 121) yang menjelaskan bahwa persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data melalui penyebaran kuesioner dan kajian kepustakaan. Skor dari perolehan penyebaran kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan statistik diskriptif dengan bentuk pengkategorian dan presentase.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun akademik tahun akademik 2019/2020.

Target/Subjek Penelitian

Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah kebijakan publik pada tahun akademik 2019/2020.

Prosedur

Prosedur penelitian ini diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner dan kajian kepustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis skor dari perolehan penyebaran kuesioner.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian disusun dengan tahapan seperti yang disampaikan oleh Hadi (1991: 7) yaitu mendefinisikan konstruk, menyidik faktor, indikator, dan dilanjutkan dengan menyusun butir-butir pertanyaan. Selain itu juga memperhatikan instrument lainnya untuk pemahaman terhadap materi dengan mengukur nilai ketuntasan mahasiswa..

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dalam penelitian ini yakni menggunakan statistik diskriptif dengan bentuk pengkategorian dan presentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan/ pembelajaran yang secara programatik prosedural berupaya memmanusiakan (*humanizing*), membudayakan (*civilizing*), serta memberdayakan (*empowering*) manusia / anak didik untuk diri dan kehidupannya agar menjadi warga negara yang baik, sebagaimana tuntutan / keharusan / yuridis konstitusional bangsa / negara yang bersangkutan (Djahiri, 2006; Sukadi, 2006; dan Nurdin, 2016).

Mata kuliah Kebijakan Publik merupakan mata kuliah wajib program studi pada program studi sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang mempunyai bobot sebesar 3 SKS. Materi dalam mata kuliah kebijakan publik telah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa nantinya ketika mereka lulus, baik pada saat mahasiswa bekerja sebagai guru di SMP atau SMA, serta mereka bekerja di instansi pemerintahan dan komunitas.

Materi dalam mata kuliah kebijakan publik adalah: (1) Dasar kebijakan publik, (2) Eksistensi kebijakan publik, (3) Model, aktor dan instrument kebijakan, (4) Proses dalam kebijakan, (5) Masalah sosial dibidang pendidikan, (6) Kebijakan dibidang pendidikan, (7) Analisis kebijakan pendidikan, dan (8) Rekomendasi kebijakan dalam pendidikan. Kedelapan materi tersebut tentunya akan diselesaikan dalam satu semester.

Selain itu dalam mata kuliah kebijakan publik disesuaikan dengan program studi yang menaungi yaitu keguruan, oleh karenanya materi tentang kebijakan pendidikan lebih ditonjolkan. Secara umum, kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan dalam bidang akademik dan pendidikan fungsional. V.G. Carter (1959) mengatakan bahwa *educational policy is a measurement that base on value system and some evaluations toward situations factors* (Carter, 1959:23). Maksudnya adalah bahwa kebijakan pendidikan itu sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasionalkan pendidikan yang bersifat lembaga (Nurdin, 2016)

Metode yang diterapkan dalam mata kuliah kebijakan publik sangat beragam, hal ini dikarenakan mata kuliah kebijakan publik ini adalah mata kuliah praktis, mahasiswa dihadapkan dengan berbagai kasus yang sedang berkembang saat ini dan selanjutnya diadakan analisis secara sistemik dengan menggunakan teori tentang kebijakan publik yang sudah disampaikan. Dalam tabel 1 berikut adalah metode dalam pembelajaran mata kuliah kebijakan publik disesuaikan dengan materi yang disampaikan.

Tabel 1. Metode Pembelajaran Mata Kuliah Kebijakan Publik

No	Materi	Jumlah Pertemuan	Metode Pembelajaran	Teknik Penilaian Pembelajaran
1	Dasar kebijakan publik	1	Ceramah Diskusi non Formal	Menggunakan tes: Tes Lisan Tes Tulis
2	Eksistensi kebijakan publik	2		
3	Model, aktor dan instrument kebijakan	2		
4	Proses dalam kebijakan	2		
5	Masalah sosial dibidang pendidikan	2	Lecture Discussion	Menggunakan non tes:

6	Kebijakan dibidang pendidikan	2	Diskusi non Formal	Wawancara Studi kasus <i>Checklist</i>
7	Analisis kebijakan pendidikan	2	Diskusi formal	
8	Rekomendasi kebijakan dalam pendidikan	2	Diskusi formal <i>Role Play</i>	

Sumber: Diolah peneliti, 2019

Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan dalam mata kuliah kebijakan publik terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah metode ceramah dan yang kedua adalah diskusi. Metode ceramah akan digunakan pada saat mahasiswa diberikan materi yang berkaitan dengan teori dan konsep tentang kebijakan publik, dalam materi ini adanya contoh-contoh kasus hanya digunakan sebagai analogi dan mempermudah pemahaman mahasiswa. Pada bagian ini teknik penilaian yang digunakan adalah menggunakan tes.

Metode kedua yang digunakan adalah menggunakan diskusi, pada pelaksanaannya diskusi ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu *lecture discussion* yaitu dosen memberikan masalah terkait dengan masalah sosial dalam bidang pendidikan dan selanjutnya mahasiswa memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan pada arahan yang diberikan oleh dosen. Diskusi formal yaitu diskusi yang dilakukan secara terstruktur dengan format yang telah ditetapkan dengan adanya ketua sebagai pengatur jalannya diskusi. Diskusi non formal yaitu diskusi yang dilaksanakan secara mengalir berdasarkan materi yang diberikan oleh dosen, dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya moderator dan dalam bentuk ini berbagi informasi atau pertanyaan sangat diperlukan dalam rangka memecahkan sebuah masalah.

Dalam bagian terakhir diperlukan adanya demonstrasi, dalam hal ini materi ini sebagai penutup dalam mata kuliah kebijakan publik, pemberian tugas yang ada pada bagian ini berupa wawancara, studi kasus, dan *checklist* selanjutnya disusun seperti halnya sebuah portofolio

kebijakan sehingga mempunyai alur yang runtut dan mudah dipahami. Demonstrasi di sini mahasiswa akan memerankan sebagai seorang pengambil kebijakan, adanya peran ini menjadikan mahasiswa seperti halnya ikut merasakan dan mendapat *feel* dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan yang telah dibuat, apakah selanjutnya rekomendasi tersebut benar-benar bermanfaat untuk masyarakat atau tidak.

Persepsi Mahasiswa dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik.

Persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan. Achmad (2017: 5) menjelaskan tentang persepsi adalah suatu pengamatan individu atau proses pemberian informasi yang diterima melalui indra individu tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan membuat kesimpulan informasi serta penafsiran suatu informasi sehingga seseorang dapat memberikan tanggapan mengenai baik buruknya informasi yang didapat.

Berdasarkan definisi di atas secara umum persepsi dalam didefinisikan sebagai proses pemberian makna, interpretasi dan stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu, dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut (Arifin, dkk. 2017: 91). Proses pembentukan persepsi menurut Walgito (1981) terjadi dalam empat tahap, yaitu: Tahap pertama, atau disebut dengan proses kealaman atau proses

fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua, atau proses fisiologis, yaitu merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga, atau proses psikologik, yaitu merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima oleh alat indera. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Dalam pelaksanaannya persepsi yang timbul tentang keberadaan mata

kuliah kebijakan publik dianalisis melalui indikator yang disampaikan oleh Hamka (2002: 101).

1. Menyerap. Proses penyerapan stimulus berupa materi-materi yang ada di mata kuliah kebijakan publik telah diorganisir oleh mahasiswa sehingga mereka dapat menyampaikan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Meskipun tidak semua mahasiswa memahami dengan baik tentang materi yang telah disampaikan selama perkuliahan berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Penyerapan Materi dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik

No	Indikator	Semester 3	Semester 5	Semester 7
1	Mahasiswa mampu menganalisis	80%	65%	75%
2	Mahasiswa mampu mengklasifikasi	80%	70%	75%
3	Mahasiswa mampu mengorganisir	80%	75%	70%

Sumber: Diolah peneliti dari kuesioner, 2019

jika semester 3 mempunyai tingkat prosentase yang lebih besar dibandingkan dengan semester lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semester 3 mempunyai persepsi yang baik dalam menyerap materi kebijakan publik yang telah disampaikan. Meskipun demikian tingkat persepsi mahasiswa dalam indikator ini termasuk baik.

2. Mengerti atau memahami. Proses mengerti dan memahami ini adalah

Tingkat penyerapan materi yang telah diberikan dari tabel di atas dapat dilihat

hasil dari proses klarifikasi dan organisir materi yang telah didapat. Hasil analisis berupa pengertian dan pemahaman yang ditunjukkan oleh nilai tes. Dalam pelaksanaannya hasil akumulasi nilai tes dalam mata kuliah kebijakan publik dilihat dari rata-rata nilai kuis, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan akhir semester, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Materi dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik

No	Indikator	Semester 3	Semester 5	Semester 7
1	Nilai Kuis	85	75	80
2	Nilai Tugas	87	79	80
3	Nilai Ujian Tengah Semester	85	75	79
4	Nilai Ujian Akhir Semester	87	78	80

Sumber: Diolah peneliti dari kuesioner, 2019

Dari tabel 3 dapat diketahui jika tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah kebijakan publik adalah semester 3 mempunyai rata-rata tingkat pemahaman yang tinggi, dilanjutkan dari semester 7 dan semester 5. Nilai yang didapat tersebut telah mampu menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap materi dalam mata kuliah kebijakan publik serta mampu melihat persepsi mahasiswa yaitu pada kategori baik.

KESIMPULAN

Dari data yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah kebijakan publik tersebut adalah baik meskipun dengan nilai yang beragam dan paling tinggi adalah tingkat persepsi pada semester 3, hal ini dilihat dari indikator yang ada serta dari nilai yang didapat mahasiswa melalui model penilaian pembelajaran tes. Banyak faktor yang menjadikan mahasiswa antusias terhadap keberadaan mata kuliah kebijakan publik dalam program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diantaranya adalah tuntutan pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika dia lulus, selain menjadi seorang pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP/SMA/ sederajat mereka juga dapat bekerja pada lembaga yang lain seperti pada lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pada bagian-bagian yang strategis seperti perencana program dan analisis kebijakan. Mata kuliah ini juga dirancang secara berjenjang dengan mata kuliah lanjutan yaitu advokasi kebijakan publik

yang lebih pada tataran praktis dan diambil tingkat di atasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Irfan Zinat dan Aria Kusuma Yuda. *Persepsi Mahasiswa PJKR Pada Mata Kuliah Pembelajaran Permainan Bola Voli di Universitas Singaperbangsa Karawang*. Jurnal Pedagogik Olahraga Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2017
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Arifin, HS. Ikhsan Fuady, Engkus Kuswono. 2017. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Volume 21 Nomor 1 Tahun 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.21.1.936>
- Carter, V.G. 1959. *Dictionary of Education*. New Jersey: Prentice Hall, second edition
- Djahiri, A.K. 2006. *Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi*. dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gilligan, Philip A. 2007. *Well-motivated Reformists or Nascent Radicals: How do Applicants to the Degree in Social Work See Social Problems, their Origins and Solutions?*. *British Journal of Social Work*, Vol. 37 No 4

- Hadi, Sutrisno. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamka. 2002. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono. 2015. *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Penentu Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. Jurnal Agastya Volume 5 Nomor 1 Januari 2015. DOI: <http://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>
- Mahardhani, Ardhana Januar. 2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Calina Media.
- Mullaly, R. 1993. *Structural Social Work: Ideologu, Theory, and Practice*. Toronto: McClelland and Stewart Inc.
- Nurdin, Encep Syarief. 2016. *Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 9(1) Mei 2016..
- Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Sukadi, I.W. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Dasar dalam Rangka Nation and Character Building dan Implikasinya terhadap Pembelajaran*. dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.
- Sunarto. Sulton. dan Ardhana Januar Mahardhani. 2019. *Pengembangan Bahan Ajar Materi Pendidikan Politik bagi Guru PPKn MTs di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Volume 1 Nomor 1 Juli-Desember 2019
- Walgito, Bimo. 1981. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.